
Implementasi Kebijakan Srikandi Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk

Lintang Idfia Rarasati¹, Ertien Rining Nawangsari²

Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur¹⁻²

Email Korespondensi: 23041010242@student.upnjatim.ac.id, ertien_rining.adneg@upnjatim.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 13 Januari 2026

ABSTRACT

The use of information technology is an important instrument in supporting bureaucratic reform and improving the quality of governance. The Nganjuk Regency Government implemented the Integrated Dynamic Archiving Information System (SRIKANDI) as part of the digitalization policy for correspondence and archiving administration at the Civil Service and Human Resources Development Agency (BKPSDM). This study aims to analyze the implementation of the SRIKANDI policy in improving the effectiveness and efficiency of personnel administration services. This study uses a qualitative method with a descriptive approach and deductive reasoning. Data were obtained through in-depth interviews, observations, and reviews of official documents relevant to the implementation of the policy. The analysis of policy implementation was conducted using the George C. Edward III model which includes aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of the study indicate that the implementation of the SRIKANDI application at the BKPSDM of Nganjuk Regency has been carried out quite well and has made a positive contribution to the management of electronic correspondence administration. However, obstacles are still found in the aspects of human resource competency and optimization of system utilization, so that strengthening the capacity of the apparatus and continuous evaluation are needed to support the success of optimal policy implementation.

Keywords: Policy implementation, SRIKANDI, digital archiving

ABSTRAK

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan instrumen penting dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengimplementasikan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai bagian dari kebijakan digitalisasi administrasi persuratan dan karsipan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan SRIKANDI dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi kepegawaian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan penalaran deduktif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, serta telaah dokumen resmi yang relevan dengan pelaksanaan kebijakan. Analisis implementasi kebijakan dilakukan dengan menggunakan model George C. Edward III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi SRIKANDI di BKPSDM Kabupaten Nganjuk telah dilaksanakan dengan cukup baik dan memberikan kontribusi positif terhadap

pengelolaan administrasi persuratan secara elektronik. Namun demikian, masih ditemukan kendala pada aspek kompetensi sumber daya manusia dan optimalisasi pemanfaatan sistem, sehingga diperlukan penguatan kapasitas aparatur dan evaluasi berkelanjutan guna mendukung keberhasilan implementasi kebijakan secara optimal.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, SRIKANDI, kearsipan.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang berlangsung sangat cepat di era digital telah membawa perubahan signifikan terhadap pola kerja pemerintahan serta mekanisme penyelenggaraan pelayanan publik. Semua kegiatan di lembaga pemerintahan kini mengandalkan teknologi untuk berjalan dengan lebih efisien dan efektif (Mukhsin, 2020). Upaya ini terus dilakukan untuk mengembangkan inovasi dalam pelayanan publik kepada setiap individu dan organisasi yang terkait di pemerintahan dengan maksud agar pelayanan yang diberikan lebih optimal. Sejalan dengan upaya digitalisasi tersebut, pemerintah Indonesia mendorong transformasi tata kelola kearsipan melalui penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai aplikasi resmi persuratan dan kearsipan elektronik nasional (Faizatur Rahmah, 2017). Dengan berkembangnya teknologi informasi, pengelolaan arsip pun mengalami transformasi menuju sistem elektronik yang lebih modern dan terintegrasi, yang kemudian selaras dengan kebijakan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) (Sari, 2025).

Pemerintah Indonesia melalui kebijakan SPBE sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam seluruh proses pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan arsip dinamis. Peraturan tersebut juga mendorong penggunaan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis yang terintegrasi, SRIKANDI (Sari, 2025). Pengembangan aplikasi ini dilakukan melalui sinergi antarinstansi pemerintah pusat, yang melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara, serta Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai lembaga yang berwenang di bidang kearsipan (Dasnoer, H., Frinaldi, A., & Magriasti, 2023). Penerapan SRIKANDI diarahkan untuk menyatukan proses persuratan dan pengelolaan arsip dinamis secara elektronik agar tercipta keseragaman sistem, efisiensi waktu. Serta peningkatan akuntabilitas administrasi pemerintahan.

Aplikasi SRIKANDI merupakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang dikembangkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai sarana digital untuk pengelolaan arsip dinamis secara elektronik di lingkungan instansi pemerintah. Aplikasi ini digunakan untuk mengatur proses surat-menjurut, pencatatan, pengelolaan arsip, disposisi, serta penyimpanan dokumen secara digital agar lebih tertib, efisien, dan mudah ditelusuri (Sari, 2025). Aplikasi SRIKANDI berfungsi sebagai sarana pengganti sekaligus penyempurnaan kearsipan konvensional dengan mengintegrasikan seluruh proses persuratan dan pengarsipan, mulai dari pembuatan, pengiriman, penomoran, disposisi, hingga penyimpanan dokumen secara digital dalam satu platform (Teku et al., 2024). Melalui Srikandi, seluruh aktivitas terkait administrasi persuratan seperti

pembuatan surat dinas, pengiriman surat elektronik antarinstansi, penomoran otomatis, sampai pengarsipa dapat dilakukan dalam satu sistem yang terintegrasi. Aplikasi ini juga mendukung Tanda Tangan Elektronik (TTE), sehingga dokumen yang diterbitkan memiliki keabsahan hukum (Pratiwi, 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi SRIKANDI memberikan kontribusi positif terhadap modernisasi tata kelola kearsipan dan peningkatan efisiensi administrasi pemerintahan (Faizatur Rahmah, 2017). Menegaskan bahwa penerapan SRIKANDI mendukung penguatan e-government dalam pengelolaan arsip daerah. Sementara itu, (Sari, 2025) Menemukan bahwa implementasi SRIKANDI di tingkat lembaga pusat telah berjalan cukup efektif, meskipun masih dihadapkan pada kendala sumber daya manusia dan adaptasi sistem. Penelitian lain oleh (Dasnoer, H., Frinaldi, A., & Magriasti, 2023) juga menunjukkan Keberhasilan penerapan SRIKANDI ditentukan oleh efektivitas penyampaian kebijakan kepada para pelaksana, kecukupan sumber daya yang tersedia, serta adanya dukungan yang kuat dari organisasi dalam menjalankan sistem tersebut.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah mengkaji implementasi SRIKANDI di sejumlah instansi pemerintah, kajian yang secara spesifik menelaah implementasi kebijakan SRIKANDI pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) di tingkat pemerintah daerah masih terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang menganalisis implementasi SRIKANDI dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III pada konteks perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan administrasi kepegawaian. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan terkait bagaimana kebijakan SRIKANDI diimplementasikan secara konkret di lingkungan BKPSDM serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

Kebijakan SRIKANDI di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nganjuk merupakan tindak lanjut dari kebijakan nasional terkait SPBE sekaligus bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola administrasi yang modern, efektif, dan akuntabel. Dasar hukum penerapan SRIKANDI di tingkat daerah secara spesifik ditetapkan melalui Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 306 Tahun 2022 yang mengatur pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Kebijakan tersebut menegaskan kewajiban setiap perangkat daerah, termasuk BKPSDM, untuk menerapkan aplikasi SRIKANDI dalam pengelolaan persuratan dan arsip dinamis secara elektronik. Melalui ketentuan ini, BKPSDM Kabupaten Nganjuk diarahkan untuk meninggalkan pola kearsipan konvensional berbasis kertas dan beralih ke sistem digital yang terintegrasi.

SRIKANDI dikembangkan sebagai upaya untuk meningkatkan kelancaran pengelolaan persuratan dan kearsipan secara elektronik guna mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Aplikasi ini memfasilitasi proses pembuatan surat serta pengelolaan arsip digital secara daring dan terintegrasi, dengan seluruh informasi terdokumentasi dan tersimpan dalam pusat data nasional

(Santoso et al., 2025). Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi memberikan kontribusi dalam peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan Aparatur Sipil Negara guna mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Melalui penerapan pengelolaan arsip digital, informasi pemerintahan dapat terdokumentasi secara terstruktur dan berkelanjutan, sehingga berperan sebagai instrumen akuntabilitas sekaligus menjadi memori kolektif bangsa dalam tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (Husna & Suhendi, 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan karakter deskriptif serta menerapkan alur berpikir deduktif dalam proses analisisnya. Pengkajian dilakukan dengan merujuk pada model implementasi kebijakan George C. Edward III yang menekankan empat unsur pokok, meliputi kejelasan komunikasi kebijakan, ketersediaan dan kecukupan sumber daya, sikap pelaksana kebijakan, serta dukungan struktur birokrasi. Kerangka analisis tersebut dimanfaatkan untuk menelaah secara komprehensif pelaksanaan kebijakan SRIKANDI di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk berdasarkan realitas empiris yang ditemukan di lapangan.

Fokus penelitian diarahkan pada dinamika implementasi kebijakan SRIKANDI di lingkungan BKPSDM Kabupaten Nganjuk, dengan melibatkan informan yang terdiri atas pejabat struktural, operator aplikasi SRIKANDI, serta aparatur yang secara langsung menangani proses persuratan dan pengelolaan arsip digital. Data penelitian bersifat kualitatif dan dihimpun melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta kajian terhadap berbagai dokumen yang bersumber dari data primer dan sekunder. Proses analisis data dilakukan secara sistematis melalui tahapan penyederhanaan data, penyajian informasi, dan perumusan kesimpulan, dengan mengklasifikasikan temuan penelitian sesuai indikator dalam model George C. Edward III untuk mengidentifikasi tingkat capaian implementasi serta berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan SRIKANDI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian hasil penelitian dan pembahasan disusun berdasarkan data empiris yang dihimpun melalui wawancara, observasi, serta studi dokumentasi. Seluruh temuan tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

1) Komunikasi

Aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan SRIKANDI di BKPSDM Kabupaten Nganjuk telah berjalan dapat dikategorikan cukup efektif, meskipun belum sepenuhnya optimal. Komunikasi kebijakan dilakukan melalui penyampaian regulasi formal berupa Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 306 Tahun 2022 yang menjadi dasar hukum penerapan SRIKANDI di seluruh perangkat daerah. Peraturan tersebut disampaikan melalui proses sosialisasi secara bertahap

dari pemerintah daerah kepada setiap organisasi perangkat daerah, termasuk BKPSDM.

Di tingkat internal BKPSDM, komunikasi kebijakan dilaksanakan melalui rapat koordinasi, penyampaian informasi secara lisan oleh pimpinan, serta bimbingan teknis penggunaan aplikasi SRIKANDI kepada aparatur yang terlibat langsung dalam pengelolaan persuratan dan kearsipan. Informasi mengenai tujuan kebijakan, prosedur penggunaan aplikasi, serta perubahan alur kerja dari sistem manual ke sistem digital telah disampaikan secara cukup jelas. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Edward III yang menegaskan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kejelasan informasi serta konsistensi pesan yang diterima oleh para pelaksana kebijakan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa intensitas dan kontinuitas komunikasi masih perlu ditingkatkan. Beberapa aparatur menyatakan bahwa sosialisasi awal belum sepenuhnya diikuti dengan pendampingan yang berkelanjutan, sehingga masih terdapat perbedaan pemahaman terkait fitur-fitur tertentu dalam aplikasi SRIKANDI. Kondisi ini berpotensi menimbulkan distorsi implementasi, khususnya pada tahap operasional harian. Meskipun komunikasi kebijakan telah berjalan, optimalisasi komunikasi dua arah dan mekanisme umpan balik masih diperlukan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

2) Sumber Daya

Sumber daya merupakan unsur krusial yang memengaruhi tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan SRIKANDI di BKPSDM Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa dari sisi sumber daya fisik dan teknologi BKPSDM relative telah siap. Ketersediaan perangkat computer, jaringan internet, serta akses terhadap aplikasi SRIKANDI sebagai sistem nasional telah mendukung pelaksanaan administrasi persuratan dan kearsipan secara elektronik. Selain itu, dukungan anggaran juga telah dialokasikan untuk menunjang operasional dan pelatihan penggunaan sistem.

Kendala utama pada aspek sumber daya berada pada kualitas sumber daya manusia. Temuan lapangan menunjukkan bahwa kemampuan dan literasi digital aparatur masih belum merata. Sebagian aparatur mampu beradaptasi dengan cepat terhadap sistem digital, sementara sebagian lainnya masih mengalami kesulitan, terutama dalam memahami alur kerja baru yang berbasis aplikasi. Kondisi ini menyebabkan proses administrasi terkadang berjalan tidak optimal dan memerlukan waktu penyesuaian yang lebih lama.

Kondisi ini sejalan dengan teori Edwards III yang menyatakan bahwa keterbatasan sumber daya manusia, khususnya kompetensi implementor, dapat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan meskipun kebijakan tersebut telah dirancang dengan baik. Temuan ini juga menguatkan hasil penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa implementasi SRIKANDI di berbagai instansi pemerintah masih menghadapi kendala pada aspek kompetensi aparatur dan kesiapan SDM. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan menjadi kebutuhan strategis untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan SRIKANDI di BKPSDM Kabupaten Nganjuk.

3) Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan merupakan aspek penting yang memengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan SRIKANDI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum aparatur BKPSDM Kbaupaten Nganjuk memiliki sikap yang cukup positif terhadap penerapan SRIKANDI. Aparatur memahami bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi dan digitalisasi administrasi pemerintahan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas kerja.

Komitmen pimpinan juga menjadi faktor pendukung dalam aspek disposisi. Pimpinan BKPSDM memberikan dukungan terhadap penerapan SRIKANDI dengan mendorong aparatur untuk beradaptasi dengan sistem baru serta menegaskan kewajiban penggunaan aplikasi dalam pengelolaan persuratan. Sikap pimpinan yang mendukung ini berkontribusi pada terbentuknya iklim organisasi yang relatif kondusif bagi implementasi kebijakan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat resistensi pasif dari sebagian aparatur yang merasa lebih nyaman menggunakan sistem manual. Resistensi ini tidak bersifat penolakan terbuka, tetapi lebih pada kecenderungan untuk kembali menggunakan cara lama ketika menghadapi kendala teknis dalam aplikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa disposisi pelaksana belum sepenuhnya homogeny dan masih dipengaruhi oleh faktor kebiasaan kerja serta tingkat penerimaan terhadap perubahan. Dalam prespektif Edward III, perbedaan sikap dan tingkat komitmen implementor dapat berdampak pada ketidakkonsistensi pelaksanaan kebijakan di lapangan.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan SRIKANDI di BKPSDM Kabupaten Nganjuk ditandai dengan adanya pembagian tugas dan kewenangan yang cukup jelas. Pelaksanaan kebijakan ini didukung oleh struktur organisasi BKPSDM yang telah menetapkan unit dan aparatur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan persuratan dan kearsipan digital. Standard Operating Procedure (SOP) terkait pengelolaan surat masuk, surat keluar, disposisi, dan pengarsipan elektronik telah disesuaikan dengan penggunaan aplikasi SRIKANDI.

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa keberadaan SOP berperan dalam memudahkan aparatur memahami alur kerja serta pembagian tanggung jawab masing-masing. Selain itu, struktur birokrasi yang relatif sederhana pada tingkat perangkat daerah turut memperlancar koordinasi antarbagian dalam pelaksanaan kebijakan. Temuan ini selaras dengan pandangan Edward III yang menegaskan bahwa struktur birokrasi yang jelas dan tidak kompleks dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa fragmentasi kewenangan antarbagian masih memerlukan penguatan koordinasi, khususnya dalam hal sinkronisasi data dan konsistensi penerapan prosedur. Perbedaan tingkat pemahaman terhadap SOP dapat menyebabkan variasi dalam praktik pengelolaan arsip digital. Oleh karena itu, evaluasi berkala terhadap SOP dan mekanisme

pengawasan internal menjadi penting untuk memastikan bahwa struktur birokrasi benar-benar mendukung implementasi kebijakan secara optimal.

SIMPULAN

Penerapan kebijakan Sistem Informasi Kearsipan Terintegrasi (SRIKANDI) pada BKPSDM Kabupaten Nganjuk menunjukkan capaian yang relatif baik dalam mendorong percepatan transformasi digital pada pengelolaan persuratan dan arsip. Hal ini ditopang oleh kejelasan dasar regulasi, dukungan struktur birokrasi, serta komitmen pimpinan dan aparatur pelaksana. Berdasarkan analisis menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III, aspek komunikasi dan struktur birokrasi dinilai telah berjalan relatif efektif, sementara keterbatasan pada kualitas sumber daya manusia dan konsistensi disposisi pelaksana masih menjadi kendala dalam mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Secara akademik, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian implementasi kebijakan publik di sektor pemerintahan daerah dengan menegaskan pentingnya penguatan kapasitas aparatur sebagai prasyarat utama keberhasilan kebijakan digital. Temuan penelitian ini memperkaya penerapan model George C. Edward III dalam konteks kearsipan digital dan administrasi kepegawaian di tingkat daerah, serta menunjukkan secara empiris bahwa keberhasilan transformasi digital kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh kesiapan sistem dan kerangka regulasi, melainkan juga oleh kesiapan para aktor pelaksana kebijakan. Sebagai bagian dari komitmen peneliti untuk memberikan kontribusi praktis yang berorientasi pada lokus penelitian, hasil penelitian ini memberikan sejumlah saran dan masukan bagi BKPSDM Kabupaten Nganjuk. Peneliti merekomendasikan penguatan kebijakan turunan melalui peningkatan kapasitas aparatur secara berkelanjutan, baik melalui pelatihan teknis, pendampingan operasional, maupun optimalisasi peran operator aplikasi SRIKANDI. Selain itu, diperlukan evaluasi berkala terhadap prosedur operasional standar serta mekanisme pengawasan internal guna memastikan konsistensi pemanfaatan aplikasi dalam seluruh proses persuratan dan kearsipan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan SRIKANDI sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola administrasi kepegawaian yang lebih efisien, trasnparan, dan akuntabel di lingkungan BKPSDM Kabupaten Nganjuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Dasnoer, H., Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). *Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) Di Kecamatan Padang Utara Kota Padang*. 9(16), 319–324.
- Faizatur Rahmah, M. (2017). *Penerapan Electronic Goverment Melalui PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT MELALUI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PROBOLINGGO* Meirinawati. 2341–2350.

- Husna, D. B., & Suhendi. (2025). Digitalisasi Administrasi di Era Smart Government. *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi*, 3(5), 2986-2507. <https://melatijournal.com/index.php/jisma/id/article/view/684>
- KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 306 TAHUN 2022 TENTANG PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK. (2022).
- Mukhsin. (2020). PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI MENERAPKAN SISTEM INFORMASI DESA DALAM PUBLIKASI INFORMASI DESA DI ERA GLOBALISASI. *Jurnal Teknologi Dan Rekayasa Sistem Komputer*, 3(1), 7-15. <https://teknokom.unwir.ac.id/index.php/teknokom/article/view/43>
- Peraturan Bupati No 22 Tahun 2024 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. (2024).
- Pratiwi, D. (2025). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Public Policy and Management Review*, 14(2), 1262-1273.
- Santoso, F. A. D., Sulistyorini, E., Wati, E. R., Cahyono, A. S., & Herminingsih, D. I. (2025). Pemanfaatan Aplikasi Srikandi Dalam Pengelolaan Arsip Pemerintah Kabupaten Tulungagung. *Journal of Governance and Public Administration*, 2(2), 426-433. <https://doi.org/10.70248/jogapa.v2i2.1671>
- Sari, A. S. (2025). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI (SRIKANDI) DI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA. 10(4), 4336-4349.
- Teku, M., Gobang, J., Retu, M., & Sedu, V. (2024). *Digital Transformation of Archives through the SRIKANDI Application*. 6(2), 261-268.